PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Radar Hari: Senin Tanggal: 17 Februari 2020 Halaman: 1



PBB

Tiba-Tiba Naik Drastis, Warga Merasa Tercekik

JOGJA, *Radar Jogja* - Dalam beberapa waktu terakhir Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2020 mulai dibagikan ke warga. Dari SPPT itu diketahui jumlah tagihan naik hingga 100 persen, bahkan ada yang 200 persen lebih

Baca Tiba... Hal 7

NAIK HINGGA 100-200%

SPPT Pajak Bumi dan Bangunan

- **Contoh Kasus**: RT 04 Patangpuluhan, Wirobrajan, Kota Jogja.
- Bangunan di pinggir jalan utama Patangpuluhan. **Sebelumnya Rp 7 juta, naik menjadi sekitar Rp 22 juta.**
- Bagian dalam bukan di pinggir jalan utama dan bukan di gang Pamularsih, **rata-rata sebelumnya Rp 600 ribu, menjadi lebih dari Rp 1 juta.**
- Bangunan sisi dalam lagi atau bukan di pinggir jalan gang Pamularsih dan bukan di jalan utama Patangpuluhan, **sebelumnya hanya Rp 114 ribu kini menjadi Rp 216 ribu.**

GRAFIS: HERPRI KARTUN/RADAR JOGJA

Tiba-Tiba Naik Drastis, Warga Merasa Tercekik

Sambungan dari hal 1

Ketua RT 04 Patangpuluhan, Wirobrajan, Jogja, Sugiyo mengatakan, 90 persen warganya mengeluh dengan kenaikan PBB yang di atas 100 persen itu. Kebanyakan bangunan mengalami kenaikan dengan nilai berbeda-beda. "Mereka mengeluh *kok* sampai segini tagihannya," katanya saat dihubungi kemarin (16/2).

Ia kemudian menjelaskan rata-rata bangunan yang PBB-nya naik. Bangunan yang berada di pinggir jalan utama Patangpuluhan sebelumnya hanya sekitar Rp 7 juta, naik menjadi sekitar Rp 22 juta. Bagian dalam bukan di pinggir jalan utama dan bukan di gang Pamularsih, rata-rata sebelumnya Rp 600 ribu menjadi lebih dari Rp 1 juta.

Kemudian bangunan sisi dalam lagi atau bukan di pinggir jalan gang Pamularsih dan bukan di jalan utama Patangpuluhan, sebelumnya hanya Rp 114 ribu kini menjadi Rp 216 ribu. "Ini seperti punya saya salah satunya," ujar Sugiyo.

Menurutnya, kebanyakan bangunan yang dimiliki warga Patangpuluhan, khususnya RT 04/RW 01 merupakan rumah pribadi dari warisan orang tua. Mayoritas warganya bermata pencaharian sebagai buruh lepas, seperti buruh bangunan, sopir, dan sebagainya. Ada juga pekerja atau karyawan perusahaan dan pegawai negeri.

Dikatakan, sebelumnya mendapat imbauan dari kelurahan untuk mengajukan keringan bagi yang merasa keberatan. Dengan memintakan surat keringanan dari RT/RW. Tetapi dari informasi yang didapat, pengajuan tetap harus menunggu dalam hitungan bulan.

Itu pun maksimal keringanan 10 persen dari ketetapan. "Tetap tinggi juga meskipun ada keringanan. Warga saya ada yang bingung cari uang ke mana, dalam jangka satu tahun harus mencari Rp 22 juta cuma untuk bayar PBB," ucap Sugiyo menirukan keluhan warganya.

Meskipun demikian, sebagai warga yang taat pajak dia tidak mempermasalahkan kenaikan PBB. Namun, kenaikan yang terlalu signifikan itu yang dikeluhkan. Apalagi tanpa ada pemberitahuan informasi sebelumnya kepada warga. "Langsung tiba-tiba, tidak ada informasi. Jelas semua warga kaget," tambahnya.

Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Kota Jogja Antonius Fokki Ardiyanto menyebut, wali kota tidak memahami suasana batin dan ekonomi rakyat. Ditambah kebijakan kenaikan PBB belum ada sosialisasi dan tidak pernah dikomunikasikan kepada dewan. "Kebijakan kenaikan PBB itu mencekik leher rakyat," katanya.

Politikus Fraksi PDIP ini meminta wali kota untuk mencabut kebijakan kenaikan yang sangat tidak masuk akal itu, *karena jauh* di atas 100 persen. "Kalau ini tidak dicabut, wali kota sama saja dengan penjajah VOC," tandasnya.

Kepala BPKAD Kota Jogja Wasesa saat dihubungi belum mau menerangkan terkait kenaikan PBB ini. "Besok saja, hari Senin (hari ini, *Red*)," ujarnya kemarin (16/2). **(wia/laz/fj)**

	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Maret 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005